

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR YANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUHP

(Studi Putusan Nomor :1367/PID.B/2019/PN DPS)

Oleh

I Nyoman Krisna Putra Satria

Prodi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis mengenai perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1367/Pid.B/2019/PN Dps), (2) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan Nomor 1367/Pid.B/2028/PN Dps. Penelitian ini menggunakan metode normatif, Penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum. Penelitian hukum normatif biasanya hanya dilakukan dengan cara studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani., Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam Putusan Nomor :1367/Pid.B/2019/PN Dps yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur Pasal 372 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Perbuatan terdakwa sejak awal terlihat menggerakkan korban dengan melakukan sebuah upaya secara melawan hukum yaitu maratabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat agar korban menyerahkan kendaraan sepeda motor kepada terdakwa dan tindakan terdakwa terbukti dengan alat bukti dipersidangan. Unsur tidak melawan hukum tidak terpenuhi maka terdakwa secara sah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP yaitu tentang Penipuan (2) Putusan Hakim dalam Putusan Nomor:1367/Pid.B/2019/PN Dps tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya bahwa hakim dalam memutus pidana penjara selama 10 bulan kurang dari ketentuan ancaman pidana dari Pasal 372 KUHP, dimana dalam ancaman pidana Pasal 372 KUHP paling lama empat tahun yang bertentangan dengan asas legalitas, dan asas keadilan bagi terdakwa.

Kata Kunci, Tindak Pidana, Penggelapan, Dasar Pertimbangan Hakim

JURIDICAL REVIEW OF MOTORCYCLE EMBEZZLEMENT ASSOCIATED WITH ARTICLE 372 OF THE CRIMINAL CODE

(Study of Decision Number: 1367/PID.B/2019/PN DPS)

By

I Nyoman Krisna Putra Satria

Law Science Program

ABSTRACT

This research aims (1) To analyze whether the perpetrator's actions fulfill the elements of the criminal act of motorcycle embezzlement under Article 372 of the Criminal Code (Study of District Court Decision Number 1367/Pid.B/2019/PN Dps), and (2) To analyze the judge's considerations in deciding the criminal act of motorcycle embezzlement based on Decision Number 1367/Pid.B/2028/PN Dps. This research uses a normative method, which focuses on the inventory of positive law, legal principles and doctrines, and legal discovery. Normative legal research is typically conducted through document studies, using legal sources such as legislation, court decisions, legal theories, and scholars' opinions on the cases being handled. Data collection techniques involve library research and document studies. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis. The research results indicate that (1) In Decision Number: 1367/Pid.B/2019/PN Dps, the defendant was legally found guilty of committing the criminal act of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code, which was not in accordance with the facts presented at trial. The defendant's actions from the beginning showed an attempt to move the victim through illegal means, including false pretenses, a series of lies, and deceit to make the victim hand over the motorcycle to the defendant, which was proven with evidence at the trial. The element of unlawfulness was not fulfilled; thus, the defendant was legally proven to have violated Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud. (2) The judge's decision in Decision Number: 1367/Pid.B/2019/PN Dps was inappropriate, as the judge sentenced the defendant to 10 months in prison, which is less than the penal threat stipulated in Article 372 of the Criminal Code, where the maximum penalty is four years, contradicting the principles of legality and justice for the defendant.

Keywords: Criminal Act, Embezzlement, Judge's Considerations